
Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran PKn pada Era Pandemi Covid-19

Abdul Karim*¹, Alil Rinenggo²

^{1,2}Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman GUPPI

*E-mail: *¹karimungan@gmail.com, ²rinenggoalil@gmail.com*

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak dalam segala aspek kehidupan. Setiap negara berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Berbagai kebijakan diterapkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat, meliputi: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM Mikro, dan PPKM Darurat. Sebagian masyarakat masih ada yang tidak mau menaati kebijakan tersebut dengan alasan tertentu, oleh sebab itu dibutuhkan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn yang diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat sehingga tumbuh kesadaran berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tujuan penulisan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pendidikan karakter di Era Pandemi melalui pembelajaran PKn. Penulisan menggunakan metode studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn secara daring atau luring merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyelamatkan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: pendidikan karakter, pembelajaran PKn, Pandemi Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic has an impact on all aspects of life. Every country tries to find out the way how to solve it. Several policies are implemented to save the society, the policies which are implemented are Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Micro PPKM, and Emergency PPKM. Some people still do not want to obey the policy for certain reasons, therefore it takes character education through PKn learning that is expected to be able to change people's perceptions so that awareness grows to participate in breaking the chain of the spread of Covid-19. The purpose of this writing is to provide education to the public about character education in the Pandemic Era through PKn or Civics Education. Writing using methods of literature studies. The results show that character education through learning PKn or Civics Education both online and offline was being the important things to save Indonesian national character in facing the Covid-19 Pandemic.

Keywords: character education; PKn learning, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sebagai sebuah penyakit baru yang muncul sejak bulan Desember 2019. Penyakit ini berawal dari sebuah kota di China yang diduga berasal dari pasar bebas atau pasar alam di Kota Wuhan yang menjual makanan ekstrem dan tidak biasa. Penyakit ini menyerang pernapasan dan telah banyak merenggut korban jiwa bagi para terdampak Covid-19. Hal yang membuat penyebaran Covid-19 ini begitu menakutkan adalah belum tersedianya vaksin untuk mengobati jenis penyakit baru ini, dan juga cara penyebarannya yang tergolong mudah. Dunia dihebohkan dengan kejadian infeksi berat yang tidak diketahui penyebabnya. Menurut laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO), sebanyak 44 pasien pneumonia dengan kategori berat di Kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan lain-lain. Pada tanggal 10 Januari 2020, penyebabnya telah teridentifikasi yaitu virus corona baru (Handayani, 2020: 120).

Covid-19 dapat menyebar melalui droplet, berjabat tangan, bahkan melalui benda mati. Virus Corona bisa mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, dan bisa

menimbulkan kematian. Pandemi Covid-19 telah menyebar pesat di Indonesia dengan tingkat penyebaran dan jumlah pasien terdampak yang semakin hari semakin meningkat. Indonesia juga merupakan negara yang juga memiliki kasus terdampak Covid yang cukup tinggi. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-17 dunia dan kedua di Asia (Tribunstyle.com, 2020). Covid-19 berdampak pada sektor pendidikan yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring memanfaatkan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, dan menampilkan beberapa jenis interaksi dalam pembelajaran (Ali & Afreni, 2020). Pembelajaran secara *online* atau daring telah menjadi suatu keharusan khususnya di dunia pendidikan sejak abad terakhir ini (He, Xu, & Kruck, 2014). Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda dalam mengatasi dan menanggulangi Pandemi Covid-19, misalnya negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana/Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam mengatasi Pandemi ini menggunakan usaha karantina wilayah atau *lockdown* menjadi suatu kebijakan yang sejenis namun berbeda, yakni kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sesuai dengan wilayah daerah masing-masing dan merupakan kebijakan lokal daerah berdasarkan instrumen dan persetujuan dari Kemenkes RI selaku pemerintahan pusat dengan menerbitkan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Wabah tersebut cukup mematikan dengan rata-rata kematian sebesar 5% dari total pasien yang tercatat terdampak Covid-19. Kemudian belum terdapatnya vaksin yang terbukti mampu untuk menyembuhkan penyakit ini. Salah satu jalan terbaik dalam kondisi pandemi ini hanyalah menggunakan cara pencegahan yang diupayakan untuk melindungi setiap orang (Muhyiddin, 2020). Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem PSPB atau merupakan sistem terapan dari *lockdown* seperti yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Dengan semakin banyaknya jumlah pasien yang terdampak Covid-19 tentunya akan memaksa PSBB diberlangsungkan semakin lama. Meskipun agenda *New Normal* sudah diterapkan, nyatanya tingkat penularan malah semakin banyak, sehingga tekanan untuk melanjutkan PSBB atau karantina wilayah semakin meningkat. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan PSPB mulai 17 April 2020, PPKM Mikro pertama kali berlaku pada 11 Januari - 25 Januari 2021 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai tanggal 3 s.d 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, agar sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan dan lainnya segera berjalan secara normal. Mengingat tingkat penyebaran virus Covid-19 kian merata. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga memerlukan karakter disiplin yang penuh sahaja.

Menurut Sobri, dkk., (2019) disiplin merupakan salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan. Artinya, dikembangkan kepada arah yang lebih baik lagi. Sedangkan, karakter adalah kumpulan fitur dan sifat yang membentuk batin individu yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya (Suradi, 2017). Gunawan (2012: 30) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dilakukan untuk membentuk bangsa yang unggul, berakhlak baik, kompetitif, beretika/bermoral, bertoleransi, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang secara dinamis, berorientasi pada Iptek yang dijiwai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila. Konsentrasi

dalam hal ini bagaimana pendidikan karakter dapat terwujud dengan menaati aturan-aturan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Warga negara yang bertanggung jawab berupaya secara maksimal dalam melaksanakan dan menggunakan hak serta kewajiban sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Syaifullah, 2008: 46).

Dalam rangka mengatasi pandemi ini, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk menekan tingkat penyebaran dari virus agar pandemi cepat berakhir. Oleh karena itu diperlukan ketaatan terhadap protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*social distancing*), memakai masker, dan menghindari kerumunan. Kesadaran dalam mewujudkannya diperlukan pendidikan dan pola pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) agar menjadi warga masyarakat yang baik dalam lingkup kehidupan bangsa dan negara. Kemudian tujuan pembelajaran PKn seperti dijelaskan (Darmadi, 2010: 52), yaitu pembinaan moral yang diinginkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, yaitu sikap yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai keyakinan atau agama, mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan persatuan bangsa dalam masyarakat yang multikultural, perilaku yang sesuai dengan kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat, dan sikap yang menunjukkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012) ada tiga domain PKn yaitu domain kurikuler, domain sosiokultural, dan domain kajian ilmiah, ketiga domain itu saling keterkaitan satu sama lainnya. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kemampuan dalam berdemokrasi sekaligus memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial warga masyarakat, siswa pada khususnya (Adha, 2015). Artinya, memberikan kesempatan siswa untuk bersikap demokratis sebagaimana mestinya. Melihat pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar demi menekan angka penyebaran virus Covid-19 dan menyelesaikan pandemi dengan cepat (Putri, 2020). Penelitian ini menguraikan tentang pentingnya menanamkan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn baik secara luring maupun daring dalam rangka untuk menyelamatkan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah data yang didapat dari pustaka (Zed, 2008). Kajian literatur ini dilakukan dengan mencari literatur dari berbagai artikel ataupun jurnal yang telah dipublikasikan yang relevan dengan pengembangan literasi digital. Berbagai macam literatur tersebut yaitu artikel jurnal yang telah dipublikasikan secara *online*, E-prosiding seminar, dan lain sebagainya. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap artikel ataupun sumber lain yang telah diperoleh dan kemudian data dideskripsikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menghadapi dan menanggulangi Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) maka Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya ... “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., maka Pemerintah RI telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam

rangka percepatan penanganan COVID-19. PSBB merupakan sebuah tindakan pembatasan kegiatan tertentu bagi masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga ada orang yang terindikasi terinfeksi covid-19. Upaya ini dilakukan pemerintah demi mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut kepada orang lain dan mengancam keselamatan warga masyarakat Indonesia. PSBB ini dibuat dengan berdasarkan pada beberapa regulasi dasar, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 “Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat”. Dalam rangka melindungi penduduk dari wabah covid 19 perlu penanggulangan yang serius sebagaimana tujuan penanggulangan bencana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penerapan PSPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 memiliki beberapa kriteria berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
 2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
- Kemudian pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 yang menyebutkan:

1. Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.

Dalam praktiknya, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah suatu kebijakan yang cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kebijakan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan yang juga lebih memilih untuk menerapkan PSBB dibandingkan dengan *lockdown* dan telah melaksanakannya sejak 20 Januari 2020. Berdasarkan pengalaman pemerintah Korea tersebut, Pemerintah Indonesia mencontoh dengan menerapkan kiat-kiat menjaga jarak setidaknya dua meter saling berjauhan satu sama lain dalam kegiatan apapun. Seperti mengantri masuk super market, pasar, dan lainnya, berpapasan atau melakukan aktivitas apapun terlebih di ruangan yang bayak kerumunan masa, namun urgensi dari penerapan PSBB ini yaitu melakukan pembatasan orang yang berada di publik dengan menghindari keramaian, dan membatasi orang lain untuk pergi keluar rumah apabila tidak begitu penting seperti membeli kebutuhan pokok.

Pembatasan Sosial Berskala Besar hampir meliputi seluruh aspek, diantaranya yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi: “Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Hal tersebut dimaksudkan ketika pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pemerintah tidak juga lepas tangan dan tidak memperhatikan masyarakatnya. Sebab dengan diterapkannya PSBB tentu akan memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, terlebih dalam hal perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah juga memerhatikan untuk tetap melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dasar masyarakatnya.

Dengan demikian, untuk memenuhi ketersediaan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya, pemerintah menerapkan enam paket kebijakan yang dapat membantu masyarakat untuk tetap tercukupi kebutuhan hariannya, terlebih bagi masyarakat yang terkena imbas buruk dari adanya penerapan PSBB. Sehingga alasan masyarakat untuk tetap keluar rumah selama pandemi demi mencari dan memenuhi kebutuhan hidup dapat dikendalikan. Diantara keenam kebijakan tersebut antara lain:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
2. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.
4. Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
5. Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
6. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal tersebut misalnya, ojek *online*, pelaku UMKM, sopir taksi, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar (Juaningsih, 2020).

Perlunya Ketaatan Masyarakat terhadap PSPB

Kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintahan pusat dianggap lebih baik daripada menerapkan *lockdown* yang dianggap dapat mematikan berbagai sektor ekonomi dan dianggap terlalu berisiko bila diterapkan di Indonesia, sehingga pemerintah pusat lebih memilih untuk menerapkan karantina wilayah sebagai suatu bentuk untuk menekan penyebaran mata rantai virus Covid-19 dengan diikuti oleh prosedur kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi para pekerja sendiri diberlakukan *Work from Home* yang memaksa para pegawai atau pekerja untuk tetap bekerja di rumah masing-masing. Untuk para pelajar tetap

menjalankan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring demi tetap mendapatkan pendidikan selama masa Pandemi (Baroroh, 2020; Santika, 2020). Meskipun dianggap kurang efektif namun koordinasi antara tenaga pendidik dengan para pelajar sangat dibutuhkan di sini, agar tidak ada ilmu dan waktu yang terbuang sia-sia selama Pandemi masih berlangsung dan menghambat segala aspek kehidupan. Namun, saat ini kenyataan yang terjadi di lapangan terdapat sebagian masyarakat yang tidak memperhatikan anjuran pemerintah. Suatu keadaan yang memaksa mereka untuk keluar dari rumah, salah satunya karena banyak masyarakat yang bekerja tidak menetap di rumah, seperti para pekerja lapangan, pedagang kaki lima, pemilik usaha mikro dan UMKM lainnya. Meskipun pemerintah telah menetapkan enam paketantisipasi masalah ekonomi, namun hal tersebut masih dirasa kurang dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup yang dibutuhkan sehari-hari warga masyarakatnya.

Masyarakat sering melanggar PSBB dengan alasan ingin menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka, padahal pemerintah dan MUI, Lembaga keagamaan setempat telah menghimbau untuk tetap beribadah di rumah saja sebab hal tersebut lebih baik demi alasan keselamatan dan kesehatan. Salah satu hal yang paling berisiko dari semua problematika setelah melewati lebih dari enam bulan masa-masa karantina wilayah atau PSBB yang diterapkan, masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi dari pandemi Covid-19 itu sendiri. Sebagian besar masyarakat yang mulai melakukan propaganda bahwa Covid-19 itu sebetulnya tidak pernah ada dan hanyalah buatan pemerintah China dan lainnya demi tujuan tertentu dengan segala teori konspirasi yang beredar dikalangan pengguna sosial media. Dengan memegang kepercayaan atas dalih tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mulai meninggalkan kepatuhan mereka atas himbauan pemerintah untuk melaksanakan prosedur kesehatan dan melakukan *social distancing* sebagaimana yang diserukan pemerintah pusat untuk segera mengakhiri Pandemi ini.

Ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan tersebut secara tidak langsung makin memperlambat proses penyelesaian dan pemutusan mata rantai Covid-19 itu sendiri. Walaupun pemerintah telah melakukan segala cara dengan harapan dapat mempercepat pulihnya Indonesia dari bencana nonalam Covid-19 namun tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka segala jenis program terbaik pun tentu saja tidak akan berhasil. Dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran diri masyarakat dalam menaati segala jenis himbauan yang diberikan oleh pemerintah dan mempercayakan kepada pemerintah dalam mencari solusi perihal masalah-masalah yang timbul selama pandemi ini, tentu saja dengan disertai usaha oleh para warga masyarakat agar koordinasi vertikal antara masyarakat dengan negara dapat terwujud dan terselenggara dengan baik (Ardhana, 2020). Hal yang harus dilakukan yaitu menjaga keharmonisan, saling menghormati dan menyayangi, menjalin persaudaraan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia (Adha & Susanto, 2020). Dengan demikian, harapan kita sama yakni menginginkan masyarakat yang patuh taat aturan terhadap PSBB.

Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan pembelajaran PKn yang dianggap mampu membentuk karakter dan kepribadian yang baik untuk para warga masyarakat Indonesia agar mau menaati protokol kesehatan dan PSBB yang diterapkan oleh pemerintahan pusat demi menekan angka penyebaran Covid-19. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kemampuan dalam berdemokrasi sekaligus memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial warga masyarakat, siswa pada khususnya (Adha, 2015). Pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar menjadi mata pelajaran saja, melainkan harus memiliki sebuah dampak positif bagi kehidupan, karena menyangkut nilai-nilai bermasyarakat serta hak dan kewajiban warga negara.

Peran Pendidikan Karakter dalam Penerapan PSBB

Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan karena pada dasarnya setiap orang haruslah menjadi pribadi yang berkarakter, dan juga berperilaku baik bagi bangsa dan negaranya. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab dalam pendidikan moral/ atau budi pekerti, dan pendidikan Pancasila saja (Santika, 2019), namun menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Penguatan pendidikan karakter saat proses pembelajaran dilakukan untuk mengatasi degradasi moral yang terjadi di Indonesia (Zubaedi, 2011: 1; Adha & Yunisca, 2016). Artinya bahwa berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat dapat kita atasi dengan pendidikan karakter. Sementara itu, secara khusus di dalam mata pelajaran PKn dapat mengaplikasikan *project citizen* sebagai bentuk memperkuat interaksi dan karakter siswa (Adha et al., 2019), sehingga di dalam bisa saling berkomunikasi dan memahami satu sama lainnya. Sebab satu bidang studi seperti PKn saja tentu tidak akan seefisien bila semua bidang studi menyisipkan pemahaman tentang menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Terlebih lagi dalam perspektif kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upaya pembentukan warga negara yang berakhlak baik khususnya terhadap warga negara muda Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi tujuan utama (Adha et al., 2017; Adha et al., 2019b). Pembentukan karakter sangat penting untuk masyarakat agar memiliki ciri khas dalam kesehariannya.

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan sesuatu hal yang benar dan salah, tetapi juga harus dibiasakan dengan contoh langsung pada peserta didik, agar timbul rasa kesadaran, pemahaman, kepedulian yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013; Adha, et. al., 2019a; Adha, et. al., 2019b). Artinya bahwa pendidikan karakter tidak hanya belajar teori saja melainkan harus ada praktiknya agar peserta didik merasa paham dan tidak bingung. Pengembangan dan pelaksanaan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal utama yang harus dijalankan (Adha, 2020). Sebab, jika nilai karakter hanya berdiam diri saja tidak dikembangkan atau dilaksanakan, maka bisa dipastikan negara tersebut akan tidak bisa mencapai tujuan negaranya yang diharapkan, sebab sumber daya manusianya masih terus diolah dalam hal nilai kehidupan. Karakter adalah jiwa yang melekat pada watak seseorang, atau akhlak yang diperoleh dari hasil proses internalisasi dengan lingkungannya selama bertahun-tahun hingga akhirnya membentuk kepribadian yang tetap. Karakter seseorang dapat menjadi baik apabila perilakunya sesuai dengan nilai-nilai moral atau etika yang berlaku, diterima, dan disepakati oleh masyarakat (Terry & Ron, 2007). Tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), meliputi: *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (tindakan moral) (Lickona, 1992). Karakter yang baik akan muncul setelah ketiga komponen karakter tersebut bisa terpenuhi.

Dalam pendidikan karakter, terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu pertama, berfungsi sebagai pembentuk dan pengembangan potensi seseorang. Hadirnya Pendidikan karakter akan membentuk potensi seseorang agar berpikiran positif, berperilaku baik dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai luhur yang lahir dari masyarakat. Kedua, fungsi perbaikan moral dan penguatan diri. Pendidikan karakter dapat memperbaiki juga dapat memperkuat keterikatan dan memaksimalkan peran masyarakat, satuan pendidikan, keluarga maupun secara perorangan dalam hal partisipasi dan merasa bertanggung jawab dalam pengembangan negara dan pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, maju serta sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memfilter budaya asing yang masuk melalui arus globalisasi dan modernisasi. Hal-hal positif yang masuk tersebut akan disaring dan diterapkan namun hal-hal positif yang tidak

bersesuaian dengan kaidah Pancasila harus ditinggalkan demi membentuk suatu karakter bangsa yang bermartabat (Zuchdi, 2010). Dengan demikian dibutuhkan koordinasi antar komponen pendidikan baik formal, informal dan juga komponen nonformal.

Sementara itu, Akin (1995) menjelaskan bahwa ada sekitar empat alasan mengapa Indonesia sangat membutuhkan pendidikan karakter, antara lain:

1. Banyak keluarga (tradisional maupun nontradisional) yang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan karakter;
2. Peran sekolah tidak hanya membentuk anak yang cerdas, tetapi juga anak yang berkarakter baik;
3. Kecerdasan anak hanya dapat bermakna apabila dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan;
4. Membentuk anak didik agar berkarakter unggul tidak hanya sekadar tugas sampingan, melainkan tanggung jawab pokok seorang guru.

Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak mau menaati peraturan yang diterapkan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu karena kurangnya kesadaran diri akan pentingnya mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara pendalaman pendidikan karakter yang dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn. PKn memberikan pembelajaran mengenai karakter diri dengan melalui berbagai aspek, diantaranya yaitu aspek politis dan aspek sosiologis. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan aspek politis yaitu ketika para pelajar usia muda tersebut mau menaati perintah dari atasan mereka yang mana dalam hal ini yaitu pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai pusat kendali yang memegang unsur politis dalam masyarakat. Dengan mempercayakan diri terhadap pemerintah berarti elemen masyarakat tersebut telah memenuhi pendidikan karakter lewat aspek politis. Selain itu adalah aspek sosiologis, artinya pendidikan karakter tersebut dibawa melalui pembelajaran dari tenaga pengajar kepada pembelajarnya. Aspek sosiologis lebih mudah diterima dibanding dengan aspek politis karena hubungan vertikal antara pelajar sebagai subjek penelitian di sini tidak terjalin secara langsung dan berpola hingga menjadi kebiasaan yang dapat diterima berdasarkan interaksi sehari-hari seperti pada aspek sosiologis.

Meskipun sedang terjadi pandemi yang tidak memungkinkan, tenaga pendidik melakukan interaksi secara langsung dengan pelajar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjalin suatu hubungan yang memungkinkan pendidik tersebut untuk memberikan pendidikan karakter lewat pembelajaran PKn baik sebagai mata pelajaran dalam tingkat menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan motivasi dari para pendidik agar para pelajar mau menaati himbauan PSBB melalui interaksi secara sosiologis. Selain dari komponen formal, aspek sosiologis juga melingkupi aspek informal dan aspek non formal. Dalam keluarga misalnya, apabila seseorang dalam keluarga yang memiliki pengaruh besar seperti kepala keluarga mampu mengarahkan anggota keluarganya untuk menaati tata tertib yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19, maka anggota keluarga lainnya akan ikut serta dalam upaya ini, selama kepala keluarga tersebut mampu menyontohkan dengan baik dan benar, hal tersebut juga berlaku dalam ruang lingkup pergaulan sehari-hari, terlebih dalam media sosial. Selama masa pandemi ini, tentunya kebanyakan orang akan menghabiskan waktunya menggunakan sosial media. Sosial media merupakan salah satu wadah atau tempat yang dapat mengubah persepsi seseorang, oleh sebab itu dibutuhkan kehati-hatian dalam mengolah informasi pemberitaan Covid-19 dalam sosial media, baik melalui Facebook, Instagram, WA, dan jaringan lainnya.

SIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mengatasi Pandemi Covid-19 salah satunya yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB yaitu suatu karantina wilayah yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan tidak mematikan seluruh aspek namun tetap diberikan batasan-batasan tertentu seperti *Work from Home*, pembelajaran daring melalui berbagai media *online* (*google classroom, google med, zoom metthing, WA* dll.). Pergaulan di dalam masyarakat harus senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lain, mencuci tangan dengan benar baik sebelum atau setelah beraktivitas. Banyak dari masyarakat yang tidak taat dengan regulasi tersebut karena berbagai alasan, salah satunya yaitu ketidakpercayaan masyarakat atas eksistensi dari Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi agar tumbuh kesadaran diri dan mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, M. M. (2019). Advantegous of volunteerism values for Indonesian community and neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-100.
- Adha, M. M. (2020). Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. *Media Komunikasi FIS*, 11(3), 216-224.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya., & Sundawa, D. (2019). Emerging volunteerism for Indonesia millennial generation: volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 467- 483.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya., & Sundawa, D. (2017). Volunteerism through Festival for Civic Virtue. Proceeding 2nd International Conference on Sociology Education, 5 Oktober 2017, Bandung, Indonesia.
- Adha, M. M., & Nurmalisa, Y. (2016). Peran lembaga sosial terhadap pembinaan moral remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1): 64-71.
- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Adha, M. M., Ulpa, E. P., Johnstone, J. M., & Cook, B. L. (2019). Pendidikan moral pada aktivitas kesukarelaan warga negara muda. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1), 28-37.
- Akin, T., Dunne, G., Palomares, S., & Schilling, D. (1995). *Character education in America School*. California: Innerchoice Publishing.
- Albitar, S.S. (2020). Impelementasi pembelajaran daring untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai dampak diterapkannya social distancing. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 5(1).
- Ali, S., & Afreni, H. (2020). Pembelajaran daring di tengah wabah covid-19. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(02).
- Ardhana, J. M. (2020). Menjadi warga negara yang baik pada masa pandemic covid-19: persprektif kenormalan baru. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Baroroh, I. (2020). Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan media daring pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(3).
- Darmadi, H. (2010). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, D. (2020). Penyakit virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2), 120.

- He, W., Xu, G., & Kruck, S. (2014). Online is education for the 21st Century. *Journal of Information Systems Education*.
- Heri, Gunawan. (2012). *Pendidikan karakter konsep dan implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Juaningsih, I. N. (2020). Penerapan sanksi pidana bagi penimbun masker di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. *'ADALAH*, 4(1), 75-80.
- Lickona, T. (1992). *Educating for character, how our school can teach respect*. New York: Bantam Books.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, new normal dan perencanaan pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2).
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Pradana, A. A., Casman., & Nur'aini. (2020). Pengaruh kebijakan social distancing pada wabah covid-19 terhadap kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 61-67.
- Putri, R. K., Sari, R. I., Wahyuningsih, R., & Meikhati, E. (2020). Efek pandemic covid 19: dampak lonjakan angka PHK terhadap penurunan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Bismak and Responsibility*, 1(1).
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). Pendidikan karakter: studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak Ibu Sunah di Tanjung Bena. *Widya Accarya*, 10(1).
- Santika, I. W. E. (2020). Pendidikan karakter pada pembelajaran daring. *IVCEJ*, 3(1).
- Sobri, M., Nursaptini, Widodo, A., Sutisna, D. (2019). Pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui kultur sekolah. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1), 61-71.
- Suradi. (2017). Pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin tata tertib sekolah. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 2(4), 407.
- Syaifullah. (2008). *Ilmu kewarganegaraan (Civic)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Terry, L. & Ron, T. (2007). *Values education and quality theaching: The Double Helix Effect*. Publisng: Australia.
- TribunStyle.com. (2020). *Capai 40 juta kasus Covid-19, simak update virus Corona dunia hari ini Senin 19 Oktober 2020*. Diakses dari <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/10/19/capai-40-juta-kasus-covid-19-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-senin-19-oktober-2020>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Winataputra, & Budimansyah. (2012). Civic education: konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian kepustakaan library*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: konsep dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zuchdi., Darmiyati., Prasetya, Z. K., & Masruri, M. S. (2010). Pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1-12.